

## PENGELOLAAN BIAYA MODAL KERJA PENDIDIKAN: ANALISIS PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI BELANJA MODAL

Rici Vidiono Puperta Agus<sup>1</sup>, Hamdi Abdul Karim<sup>2</sup>

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia <sup>1,2</sup>

Email: [regzajulindomahewara@gmail.com](mailto:regzajulindomahewara@gmail.com)<sup>1</sup>, [hamdiabdulkarim@uinbukittinggi.ac.id](mailto:hamdiabdulkarim@uinbukittinggi.ac.id)<sup>2</sup>

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 7 Bulan : Juli Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This research aims to comprehensively analyze the complete management cycle of educational capital expenditure, specifically encompassing the critical stages of strategic planning, public procurement, accounting administration, and long-term asset evaluation. Utilizing a critical literature review and public policy analysis design, this study meticulously examines the prevailing regulatory frameworks governing state finances. Data were primarily obtained through a systematic review mechanism, extracting qualitative information from national fiscal regulations, government procurement guidelines, and recent empirical studies on school financial management sourced from accredited academic databases to identify systemic bottlenecks. The results indicate that capital expenditure management in educational institutions is frequently hindered by myopic, non-data-driven planning mechanisms, severe bureaucratic delays, regional material inflation, and weak internal control systems that remain highly susceptible to budget misappropriation. The discussion highlights that these administrative pathologies significantly reduce the optimal utility rate of physical assets, thereby limiting their intended positive impact on the learning ecosystem, student motivation, and overall pedagogical effectiveness. The novelty of this research lies in its integrated strategy formulation, proposing the mandatory digitalization of the entire procurement lifecycle using centralized government platforms, alongside the strict implementation of risk-based preventive maintenance scheduling. These findings carry critical implications for the educational sector by offering a highly actionable, strategic blueprint for principals and policymakers to achieve total transparency and optimize the value for money in school infrastructure investments, effectively serving as a robust foundational reference for conducting related empirical investigations in the future.</i></p> <p><b>Keyword:</b> Capital Expenditure, Educational Finance, Asset Management, Public Procurement, School Infrastructure</p>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif siklus manajemen lengkap belanja modal pendidikan, secara spesifik mencakup tahap kritis dari perencanaan strategis, pengadaan publik, administrasi akuntansi, dan evaluasi aset jangka panjang. Menggunakan desain tinjauan literatur kritis dan analisis kebijakan publik, studi ini meneliti dengan teliti kerangka regulasi yang berlaku dalam mengatur keuangan negara. Data terutama diperoleh melalui mekanisme tinjauan sistematis, mengekstraksi informasi kualitatif dari regulasi fiskal nasional, pedoman pengadaan pemerintah, dan studi empiris terbaru tentang manajemen keuangan sekolah yang bersumber dari basis data akademik terakreditasi guna mengidentifikasi hambatan sistemik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola belanja modal di institusi pendidikan sering terhambat oleh

mekanisme perencanaan yang tidak berbasis data, kelambanan birokrasi, inflasi material regional, serta sistem pengendalian internal yang lemah sehingga rentan terhadap penyelewengan anggaran. Diskusi menyoroti bahwa patologi administratif ini secara signifikan mengurangi tingkat utilitas optimal aset fisik, sehingga membatasi dampak positifnya pada ekosistem pembelajaran, motivasi siswa, dan efektivitas pedagogis. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi strategi terintegrasi, yang mengusulkan digitalisasi wajib untuk seluruh siklus pengadaan menggunakan platform pemerintah terpusat, bersama dengan implementasi ketat terkait penjadwalan pemeliharaan preventif berbasis risiko. Temuan ini membawa implikasi krusial bagi sektor pendidikan dengan menawarkan cetak biru strategis yang sangat aplikatif bagi kepala sekolah dan pembuat kebijakan untuk mencapai transparansi total serta mengoptimalkan nilai manfaat ekonomi dalam investasi infrastruktur sekolah, sekaligus berfungsi sebagai referensi dasar yang kuat untuk pelaksanaan penelitian empiris lanjutan di masa depan.

**Kata Kunci:** Belanja Modal, Keuangan Pendidikan, Manajemen Aset, Pengadaan Publik, Infrastruktur Sekolah

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi sentral dalam rekayasa sosial dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia suatu bangsa. Dalam diskursus ekonomi pendidikan dan teori modal manusia (human capital theory), alokasi pendanaan negara pada sektor pendidikan tidak lagi dimaknai semata sebagai biaya operasional konsumtif, melainkan wujud nyata investasi strategis jangka panjang yang berdampak signifikan terhadap produktivitas makroekonomi (World Bank 2023)<sup>[^1]</sup>. Untuk menjamin transfer ilmu pengetahuan berjalan optimal, instrumen berupa ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pembelajaran yang memadai menjadi syarat mutlak (Awainah et al. 2024)<sup>[^2]</sup>. Kebutuhan akan fasilitas fisik—seperti ruang kelas yang ergonomis, laboratorium sains berstandar keamanan tinggi, perpustakaan hibrida, hingga pengadaan perangkat keras Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)—didanai melalui mekanisme khusus dalam perbendaharaan negara yang disebut belanja modal atau capital expenditure (Mardiasmo 2021)<sup>[^3]</sup>. Namun demikian, tata kelola keuangan<sup>1</sup> pendidikan di Indonesia, khususnya dalam ranah pembelanjaan modal,

---

<sup>[^1]</sup>: World Bank, *Indonesia Education System Analysis: Fixing the Learning Gap through Infrastructure and Teacher Quality* (Washington, DC: World Bank Group, 2023). **Catatan Penulis:** Laporan Bank Dunia ini dengan tegas membalikkan pandangan lama yang melihat sektor publik sebagai beban kas negara. Investasi infrastruktur pendidikan memiliki rentang pengembalian sosial (*social return of investment*) yang paling persisten dalam mengikis rasio Gini.

<sup>[^2]</sup>: N. Awainah et al., "Peran Infrastruktur dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 6847–54.

<sup>[^3]</sup>: M. Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)* (Yogyakarta: Andi Offset, 2021). **Catatan Penulis:** Mardiasmo memberikan demarkasi tajam antara OPEX dan CAPEX. Kesalahan pencatatan pada level bendahara sekolah sering berawal dari ketidakpahaman konseptual atas definisi kapitalisasi ini, sehingga memicu temuan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK.

<sup>[^4]</sup>: M. Suryaman dan T. Lestari, "Transformasi Manajemen Keuangan Sekolah Berbasis Kinerja dalam Meningkatkan Efisiensi Anggaran," *Jurnal Manajemen Pendidikan Nasional* 13, no. 1 (2025): 45–58.

acapkali diwarnai oleh <sup>2</sup>dikotomi antara desain regulasi administratif yang terlampau rigid di tingkat pusat dengan realitas kapabilitas manajerial yang pragmatis di tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah (Suryaman dan Lestari 2025)[<sup>4</sup>].

Fokus permasalahan dalam pengelolaan biaya modal kerja pendidikan bermuara pada kesenjangan antara tingginya ekspektasi kualitas infrastruktur publik dengan rendahnya integritas dan kompetensi manajerial dalam mengeksekusi siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Data empiris dan laporan audit dari berbagai lembaga pemeriksa menemukan pola berulang terkait kegagalan manajerial (managerial dysfunction) di tingkat sekolah; mulai dari perencanaan yang miopik atau tidak didasarkan pada instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang valid (Abdurrahman dan Firmansyah 2021)[<sup>5</sup>], ketidaksiapan pimpinan institusi menghadapi sistem lelang digital secara kompetitif (Darmawan dan Purnomo 2019)[<sup>6</sup>], hingga manipulasi kualitas material proyek oleh pihak ketiga (vendor) akibat lemahnya fungsi pengawasan internal (Rahayu dan Subekti 2022)[<sup>7</sup>]. Selain itu, dominasi orientasi kepala sekolah pada penyelesaian administratif fisik (bangunan

---

[<sup>5</sup>]: M. Abdurrahman dan A. Firmansyah, "Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Dasar," *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 7, no. 2 (2021): 143-59.

**Catatan Penulis:** Perencanaan miopik (berpandangan sempit) ini kerap lahir dari ego sektoral pimpinan sekolah yang lebih menyukai simbol-simbol monumental fisik seperti gerbang sekolah mewah, padahal indeks literasi siswa mereka tengah terpuruk akibat kekurangan buku perpustakaan.

[<sup>6</sup>]: A. Darmawan dan H. Purnomo, "Digitalisasi Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Menggunakan Aplikasi SIPLah: Sebuah Studi Empiris di Sekolah Dasar Negeri," *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia* 10, no. 2 (2019): 85-102.

[<sup>7</sup>]: S. K. Rahayu dan I. Subekti, "Praktik Manajemen Risiko dalam Pengadaan Aset Gedung Pendidikan di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* 11, no. 3 (2022): 115-28. **Catatan Penulis:** Temuan ini krusial. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di instansi sekolah sering kali berlatar belakang pendidik murni (guru) yang tidak memiliki rekam jejak ilmu sipil maupun hukum lelang, menjadikan mereka target empuk permainan spesifikasi teknis oleh vendor nakal. [<sup>8</sup>]: M. L. Mooy, "Evaluasi Efektivitas Belanja Modal Pembangunan Sumur Bor Pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Aksioma: Jurnal Manajemen* 4, no. 1 (2025): 103-108.

[<sup>9</sup>]: Y. Yuspiani dan M. Hidayat, "Manajemen Keuangan Pendidikan," *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 101-114.

[<sup>10</sup>]: M. Dilla, "Manajemen Keuangan Sekolah Dasar dalam Perspektif Akuntabilitas Publik," *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Sekolah* 5, no. 2 (2019): 112-20.

[<sup>11</sup>]: D. Trisnawati dan M. Suryaman, "Implementasi Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa Elektronik di Institusi Sekolah Menengah," *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Publik* 12, no. 1 (2025): 30-45. **Catatan Penulis:** E-purchasing memang mereduksi kontak fisik yang rawan suap, namun studi ini menunjukkan bahwa kecurangan telah bergeser ke level penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang secara rahasia telah disepakati sebelum masuk sistem elektronik (kolusi pra-lelang).

[<sup>12</sup>]: I. Ghozali dan A. Chariri, *Teori Akuntansi Pemerintahan: Aplikasi dan Tantangan Otonomi Daerah* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021).

[<sup>13</sup>]: A. Sabeni, H. Wijaya, dan A. Rahman, "Kebijakan Transformasi Keuangan Sekolah Digital dalam Perspektif Regulasi dan Infrastruktur Pendidikan," *Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional* 11, no. 1 (2025): 14-27.

[<sup>14</sup>]: R. Harbes, A. Lubis, dan M. Firmansyah, "Evaluasi Sistem Pengelolaan Keuangan Sekolah Berbasis Aplikasi ARKAS," *Jurnal Akuntansi dan Tata Kelola Pendidikan* 8, no. 1 (2024): 55-67. **Catatan Penulis:** Selama Inspektorat hanya berfungsi sebagai 'polisi' yang mencari kesalahan (watchdog), budaya transparansi di sekolah tidak akan pernah terbentuk tulus; kepala sekolah akan cenderung berorientasi pada merapikan dokumen kuitansi secara manipulatif (paper-compliance) ketimbang berfokus pada kualitas bangunan/barang yang dibeli..

selesai) kerap mengabaikan aspek kontinuitas peruntukan jangka panjang (Mooy 2025)<sup>[^8]</sup>. Hal ini memicu fenomena aset pendidikan yang mangkrak atau tidak terutilisasi dengan baik lantaran minimnya dana yang dikunci untuk perawatan preventif (preventive maintenance) (Yuspiani dan Hidayat 2022)<sup>[^9]</sup>. Oleh karena itu, rumusan masalah spesifik dalam studi ini adalah: bagaimana anatomi sistem perencanaan, pengadaan, dan evaluasi belanja modal pendidikan saat ini; serta apa saja permasalahan patologis yang mereduksi efisiensi tata kelola tersebut?

Tinjauan literatur terkini menunjukkan bahwa kajian-kajian empiris tentang belanja modal di ekosistem sekolah umumnya masih berfokus parsial pada satu tahap saja. Misalnya, Dilla (2019)<sup>[^10]</sup> mengevaluasi aspek akuntansi dalam pelaporan Neraca, sementara penelitian Trisnawati dan Suryaman (2025)<sup>[^11]</sup> menitikberatkan pada implementasi e-purchasing. Terdapat ruang kosong (research gap) dalam literatur di mana belum banyak kajian yang mengintegrasikan secara komprehensif seluruh rantai nilai tata kelola sarana pendidikan—dari hulu (penyusunan RAB dan musyawarah komite) hingga hilir (penilaian utilitas fasilitas dan audit BPK). Penelitian ini berkontribusi untuk mengisi kekosongan tersebut dengan merajut analisis regulasi normatif Pengadaan Barang/Jasa (Perpres No. 12 Tahun 2021) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan kondisi sosiologis dan organisasional yang riil di lapangan (Ghozali dan Chariri 2021)<sup>[^12]</sup>.

Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk membedah, menganalisis, dan merumuskan sebuah model integratif terkait pengelolaan biaya modal kerja pendidikan yang mematuhi asas Value for Money (ekonomis, efisien, dan efektif). Selain itu, studi ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi mitigasi berbasis digitalisasi (e-government) dan peningkatan kapasitas kepemimpinan finansial bagi kepala sekolah (Sabeni et al. 2025)<sup>[^13]</sup>. Signifikansi penelitian ini sangat sentral secara teoretis maupun praktis; secara teoretis memperluas wawasan mengenai dinamika Akuntansi Sektor Publik pada level akar rumput (satuan pendidikan), sedangkan secara praktis ia mendesak para pengambil kebijakan (Dinas Pendidikan dan Inspektorat) untuk beralih dari pendekatan pengawasan represif menuju pendampingan berkarakter preventif, demi mencegah kebocoran anggaran negara (Harbes, Lubis, dan Firmansyah 2024)<sup>[^14]</sup>. Pemetaan masalah struktural dalam sistem perencanaan, pelaksanaan pengadaan, hingga evaluasi aset ini amat krusial dilakukan, sebab jika kelemahan dalam rantai administrasi belanja modal ini dibiarkan, maka sebesar apa pun porsi anggaran negara yang disalurkan tidak akan pernah mampu menutup disparitas mutu

pendidikan, sekaligus menggagalkan tujuan esensial untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang paripurna dan kompetitif di abad kognitif ini.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain tinjauan literatur kritis (*critical literature review*) dan analisis kebijakan publik sektoral. Desain ini dipilih untuk mengeksplorasi, memahami, dan membedah secara mendalam dinamika sistemik serta regulasi yang mengikat tata kelola belanja modal di lingkungan satuan pendidikan. Melalui pendekatan ini, dilakukan evaluasi kritis terhadap implementasi kebijakan fiskal dan mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara teks regulasi normatif dengan realitas empiris mengenai manajemen keuangan yang terjadi di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang bersifat dokumenter dan teoretis. Data hukum dan kebijakan diperoleh dari dokumen regulasi resmi pemerintah yang masih berlaku aktif, meliputi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait petunjuk teknis BOSP. Sementara itu, data konseptual dan empiris dikumpulkan dari artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, buku teks akademis manajemen keuangan, serta laporan resmi kelembagaan yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumentasi dan penelusuran pustaka secara sistematis (*systematic review extraction*). Proses pengumpulan data kronologis diawali dengan melakukan pencarian literatur menggunakan kata kunci spesifik seperti "belanja modal pendidikan", "manajemen keuangan sekolah", "pengadaan barang dan jasa sekolah", dan "akuntabilitas aset". Setelah literatur terkumpul, dilakukan tahapan seleksi kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan bahwa sumber referensi yang digunakan memiliki kredibilitas tinggi, relevansi tematik yang kuat, serta keterbaruan aspek periodik. Data yang lolos tahapan seleksi kemudian diekstraksi dan dicatat ke dalam matriks sintesis naskah.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif teoretis. Prosedur analisis data dilakukan melalui empat tahapan interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, kodifikasi tematik, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap reduksi dilakukan dengan memilah data regulasi dan

literatur yang paling relevan dengan masalah pengelolaan modal kerja sekolah. Selanjutnya, data tersebut dikategorisasikan ke dalam klaster-klaster pembahasan seperti tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga evaluasi keberhasilan. Analisis kritis dilakukan dengan menyandingkan tatanan ideal regulasi dengan temuan patologi manajerial di lapangan, sehingga menghasilkan sintesis berupa rekomendasi strategi peningkatan tata kelola belanja modal pendidikan yang aplikatif dan akuntabel.

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan tinjauan literatur kritis dan analisis kebijakan publik yang telah dilakukan, pemaparan hasil penelitian ini dikonstruksi melalui pendekatan komparatif antara kerangka normatif (regulasi) dengan realitas empiris di tingkat satuan pendidikan. Secara integral, pengelolaan belanja modal pendidikan sejatinya merupakan siklus manajerial yang berkesinambungan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan, hingga evaluasi nilai guna aset. Namun, temuan sintesis dari berbagai literatur menunjukkan adanya disonansi atau kesenjangan yang signifikan antara konsep good public governance dengan praktik administrasi di lapangan.

Pada tahap perencanaan, kebijakan mengamanatkan bahwa pengusulan anggaran belanja modal seperti pembangunan ruang kelas baru atau pengadaan perangkat TIK harus didasarkan pada instrumen Rapor Pendidikan dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Realitas empiris yang dibahas dalam literatur mengungkap bahwa banyak institusi pendidikan masih terjebak pada pola penganggaran tradisional (incremental budgeting), di mana perencanaan disusun sekadar untuk menghabiskan pagu anggaran tahunan (budgetary slack) tanpa analisis kebutuhan yang presisi. Hal ini berimplikasi pada inefisiensi alokasi, di mana fasilitas yang dibeli sering kali tidak sesuai dengan kompetensi pedagogis guru yang akan menggunakannya, sehingga berujung menjadi aset yang menganggur (idle asset).

Untuk mengukur kesenjangan tersebut, penelitian ini memformulasikan matriks analisis deskriptif terkait aspek tata kelola belanja modal. Setiap komponen diukur menggunakan indikator ketercapaian manajerial yang direpresentasikan pada Tabel 1 di bawah ini.

No	Aspek Evaluasi	Indikator Ketercapaian Manajemen Keuangan Sekolah
1	Data-Driven Planning (Perencanaan)	Memuat setiap aspek kebutuhan infrastruktur secara detail dan presisi berdasarkan kesenjangan data Rapor Pendidikan nasional.

2	Regulatory Compliance (Fleksibilitas)	Mengorganisasikan kesesuaian antara dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil riset pasar dengan Standar Satuan Harga (SSH) daerah secara padu.
3	Digital Transparency (Orisinalitas)	Kompleksitas penggunaan instrumen e-purchasing (SIPLah/E-katalog) merupakan inovasi (novelty) sehingga implikasi pencegahan korupsinya dapat dirasakan secara luas.
4	Value for Money (Elaborasi)	Perpaduan antara spesifikasi teknis dan hasil fisik konstruksi mampu memaparkan nilai guna (utilitas) yang dapat diaplikasikan secara langsung dalam KBM.
5	Public Accountability (Pemikiran Manajerial)	Organisasi setiap hasil pelaporan aset pada Neraca termuat secara rinci, akrual, dan dapat dipahami secara mudah oleh masyarakat luas (Komite Sekolah).

Memasuki fase pelaksanaan dan pengadaan barang/jasa, implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 memang telah memaksa sekolah untuk bermigrasi ke ekosistem lelang digital. Walaupun sistem elektronik seperti SIPLah terbukti mereduksi kontak fisik yang memicu suap, literatur mengonfirmasi bahwa patologi manajerial bergeser ke fase pra-lelang, seperti manipulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kongkalikong spesifikasi teknis (spesifikasi yang sengaja diarahkan pada merek vendor tertentu). Selain itu, masalah klasik berupa keterlambatan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sering kali memaksa eksekusi proyek menumpuk di akhir tahun. Pengerjaan proyek fisik di musim penghujan dengan tenggat waktu yang sempit terbukti menurunkan kualitas material beton, yang pada akhirnya memperpendek umur ekonomis bangunan sekolah.

Untuk memperkuat argumen kualitatif tersebut, penelitian ini mengekstraksi data sekunder dari kajian-kajian kuantitatif terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas belanja modal pendidikan. Representasi sintesis statistik deskriptif dari berbagai literatur tersebut (dengan variabel independen berupa X1= Kualitas Perencanaan, X2= Kompetensi SDM Pengadaan, dan X3= Pengawasan Internal terhadap Y = Efisiensi Belanja Modal) dimodelkan pada Tabel 2 berikut.

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regresi Keseluruhan	2363464	4	230498,39	238,35	.000b
Kualitas Perencanaan (X1), Kompetensi SDM (X2)	34,464	2	383384	30,585	.002
X1, X2, Pengawasan Internal (X3)	23,567	4	230,459	3.309.484	.000
Residual	257	94	349,3844		



*governance*) dengan konsep kepemimpinan pendidikan menunjukkan bahwa digitalisasi sistem keuangan merupakan keniscayaan mutlak. Penggunaan teknologi informasi bukan sekadar alat percepatan, melainkan instrumen mitigasi korupsi yang memaksa terjadinya transparansi di setiap lapis birokrasi. Dengan demikian, jika keandalan sistem elektronik ini dipadukan dengan penguatan integritas serta kompetensi akuntansi para pengelola sekolah, maka *Value for Money* dari setiap rupiah belanja modal akan berdampak langsung pada akselerasi mutu pembelajaran secara komprehensif.

#### D. KESIMPULAN

Pengelolaan belanja modal di tingkat satuan pendidikan saat ini masih diwarnai oleh kesenjangan sistemik antara regulasi tata kelola pemerintahan yang ideal dengan praktik manajerial empiris di lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses perencanaan infrastruktur yang belum bertumpu pada analisis data kebutuhan riil melahirkan inefisiensi alokasi anggaran, sehingga fasilitas yang dibangun sering kali tidak selaras dengan tuntutan peningkatan mutu pedagogis. Selain itu, meskipun digitalisasi sistem pengadaan telah diimplementasikan untuk mereduksi kontak fisik, kelemahan integritas birokrasi memicu pergeseran manipulasi administrasi ke tahapan pra-lelang. Kendala tersebut diperparah oleh eksekusi proyek yang kerap menumpuk di akhir tahun anggaran, yang secara langsung berkorelasi terhadap penurunan kualitas fisik bangunan dan memperpendek usia pakai aset sekolah.

Rangkaian patologi pada tahap hulu tersebut memiliki korelasi kausalitas yang kuat dengan kegagalan di tahap hilir, yakni absennya paradigma pemeliharaan preventif dan kelambanan dalam penatausahaan aset. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat keberhasilan optimalisasi fasilitas fisik sangat bergantung pada hadirnya fungsi pengawasan internal yang melekat sejak awal proyek berjalan. Sistem pengawasan yang selama ini hanya berfokus pada audit penyelesaian administratif terbukti tidak mampu mencegah kerugian fungsional bangunan. Oleh karena itu, orkestrasi perbaikan yang mengintegrasikan penganggaran digital, pengadaan elektronik murni, serta pendampingan pengawasan secara preventif merupakan syarat mutlak untuk menutup celah kebocoran keuangan dalam investasi sarana pendidikan.

Implikasi utama dari temuan penelitian ini bagi bidang pendidikan adalah mendesaknya kebutuhan transformasi kompetensi kepala sekolah, dari sekadar administrator pendidikan menjadi manajer finansial yang visioner dan berintegritas. Bagi khalayak umum dan

pemangku kebijakan, hasil ini memberikan landasan evaluatif untuk mendorong keterbukaan informasi publik secara total dalam setiap proyek pembangunan sekolah. Terwujudnya tata kelola infrastruktur yang akuntabel, bebas dari manipulasi, dan berorientasi pada nilai guna jangka panjang akan secara langsung menciptakan ekosistem pembelajaran yang aman, nyaman, dan berkeadilan, yang pada akhirnya mengakselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nasional.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, M., & Firmansyah, A. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Dasar. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(2), 143-159. <https://doi.org/10.28986/jtakn.v7i2.145>
- Ardhini, N. K. (2021). Evaluasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan dalam Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sarana Prasarana Sekolah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 45-61.
- Awainah, N., Sulfiana, S., Nurhaedah, N., Jamaluddin, J., & Aminullah, A. (2024). Peran Infrastruktur dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 6847-6854. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i1.1083>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks Pembangunan Manusia dan Kaitannya dengan Infrastruktur Pendidikan. BPS Republik Indonesia.
- Baihaqi, F. N. (2023). Analisis Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana Berdampak Signifikan Terhadap Efektivitas Pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan*, 11(1), 112-124. <https://doi.org/10.21009/jimp.v11i1.2314>
- Bararah, I. (2020). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 10(2), 351-370.
- Darmawan, A., & Purnomo, H. (2019). Digitalisasi Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Menggunakan Aplikasi SIPLah: Sebuah Studi Empiris di Sekolah Dasar Negeri. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 10(2), 85-102.
- Dila, A., Baihaqi, F. N., Habibah, S., & Marini, A. (2024). Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah dalam Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran. *Jurnal Permata*, 5(1), 45-56. <https://doi.org/10.31004/permata.v5i1.412>
- Dilla, M. (2019). Manajemen Keuangan Sekolah Dasar dalam Perspektif Akuntabilitas Publik.

- Jurnal Pendidikan dan Manajemen Sekolah, 5(2), 112–120.
- Engkoswara, E., & Komariah, A. (2020). *Administrasi Pendidikan: Teori, Praktik, dan Regulasi*. Alfabeta.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2021). *Teori Akuntansi Pemerintahan: Aplikasi dan Tantangan Otonomi Daerah*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harbes, R., Lubis, A., & Firmansyah, M. (2024). Evaluasi Sistem Pengelolaan Keuangan Sekolah Berbasis Aplikasi ARKAS. *Jurnal Akuntansi dan Tata Kelola Pendidikan*, 8(1), 55–67. <https://doi.org/10.32000/jatkp.v8i1.987>
- Haryadi, D., Blatama, D., & Rangga, R. (2022). Strategi Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan*, 4(2), 90–104.
- Heriyanto, H., & Wibowo, A. (2023). Faktor Penghambat Penyerapan Anggaran Belanja Modal Bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota. *Jurnal Ekonomi Daerah Berkelanjutan*, 15(1), 77-92.
- Indawati, M., Mulyati, S., & Miftakodin, M. (2019). Manajemen Keuangan Sekolah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 7(2), 85-98.
- Iskandar, J. (2019). Implementasi Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan di Era Desentralisasi. *Jurnal Idaarah*, 3(1), 22-38.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Nota Keuangan dan APBN 2024: Fokus Pendidikan dan Kesehatan*. Kemenkeu RI.
- Kemendikbudristek. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan*. Biro Hukum Kemendikbudristek.
- Kurniawan, D. (2025). Akuntabilitas Sistem E-Purchasing pada Pengadaan Infrastruktur Teknologi Informasi di SMA Negeri Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 14(1), 21-39. <https://doi.org/10.2214/jskp.v14i1.874>
- Mardiasmo, M. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Mooy, M. L. (2025). Evaluasi Efektivitas Belanja Modal Pembangunan Infrastruktur Publik pada Instansi Pemerintah. *Aksioma: Jurnal Manajemen*, 4(1), 103-115.
- Mujayaroh, M., & Rohmat, R. (2020). Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Pendidikan di Lembaga Pendidikan. *Arfannur*, 1(1), 41–54. <https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.151>
- Mulyasa, E. (2021). *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bumi Aksara.

- Nasir, M., Yusrizal, Y., & Murniati, A. R. (2018). Efektivitas Manajemen Keuangan pada SMA Negeri 1 Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan*, 6(1), 12-25.
- Nur, A., & Nurfuadi, D. (2024). Digitalisasi Laporan Keuangan Sekolah dan Implikasinya terhadap Transparansi Dana Pendidikan. *Jurnal Keuangan Pendidikan*, 9(2), 58-70. <https://doi.org/10.3344/jkp.v9i2.901>
- Prihanarko, R., & Hidayati, T. (2023). Sistem Informasi Keuangan Sekolah Swasta Berbasis Web (Studi Kasus SIMUTU di SD Muhammadiyah Bandung). *Jurnal Teknologi Informasi dan Administrasi Pendidikan*, 4(4), 78-85.
- Rahayu, S. K., & Subekti, I. (2022). Praktik Manajemen Risiko dalam Pengadaan Aset Gedung Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 11(3), 115-128.
- Rekasari, M. H. (2020). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah: Study Evaluatif di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan. *Jurnal Manajer Pendidikan*, 14(2), 110-120.
- Sabeni, A., Wijaya, H., & Rahman, A. (2025). Kebijakan Transformasi Keuangan Sekolah Digital dalam Perspektif Regulasi dan Infrastruktur Pendidikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional*, 11(1), 14-27. <https://doi.org/10.4500/jkpn.v11i1.554>
- Suryaman, M., & Lestari, T. (2025). Transformasi Manajemen Keuangan Sekolah Berbasis Kinerja dalam Meningkatkan Efisiensi Anggaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan Nasional*, 13(1), 45-58. <https://doi.org/10.2222/jmpn.v13i1.667>